

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK PILIH ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA (ODGJ) DALAM PEMILIHAN UMUM**

**(Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang
Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

MUHAMMAD FUAD HASAN

Npm : 1621020420

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Pembimbing II : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M.

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021 M**

ABSTRAK

Perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia kembali menjadi perbincangan menarik di penghujung tahun 2018 muncul satu fenomena yang menarik untuk dibahas yaitu berkaitan dengan hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu. Dalam Peraturan KPU Nomor 37 tahun 2018 yaitu adanya jaminan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa. Kedudukan hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa atau penyandang disabilitas mental baik dalam Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU tidak mengaturnya atau tidak memberi batasan hak bagi orang dengan gangguan jiwa untuk ikut serta memilih dalam pemilihan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hak pilih bagi orang yang terkena gangguan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar pemilih didalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* perihal hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan Literatur (Kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian. Yang berasal dari : Al-Qur'an, Hadist, buku-buku *fiqh*, serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Dan hasil penelitian ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 37 Tahun 2018 khususnya bagi hak pilih orang dengan gangguan jiwa dapat dikatakan telah terjadi ketidakpastian hukum, sebab mengandung multitafsir hukum maupun keraguan, dengan tidak menegaskan hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) didalam Undang-Undang tersebut. Dan berdasarkan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilihan umum penulis mengambil kesimpulan bahwa menolak kemudharatan (keburukan) lebih di utamakan dibanding meraih kemanfaatan. Maka tinjauan *fiqh siyasah* terhadap hak pilih orang dengan gangguan jiwa dalam pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2018 berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan kaidah *fiqh* bahwa orang dengan gangguan jiwa tidak diperkenankan untuk memilih sebab tidak memiliki akal yang cukup sebagai landasan untuk memilih, dengan tetap memberikan hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa berdasarkan persamaan hak merupakan kemudharatan hal ini tentu saja bertolak belakang dengan kaidah *fiqh*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FUAD HASAN

NPM : 1621020420

Jurusan/Prodi : Siyasah Syari'yyah (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Pemilihan Umum (Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, Desember 2020



Muhammad Fuad Hasan

NPM 1621020420



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

Pernyataan Orisinalitas

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MUHAMMAD FUAD HASAN

NPM : 1621020420

JURUSAN : Siyasah (Hukum Tata Negara)

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK PILIH
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)
DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Kritis Terhadap
Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu
dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018).

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil orisinal penulis, tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali diakui dengan referensi yang dibuat dalam teks. Jika kemudian hari terbukti bukan hasil karya sendiri maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

Muhammad Fuad Haasan

NPM. 1621020420



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

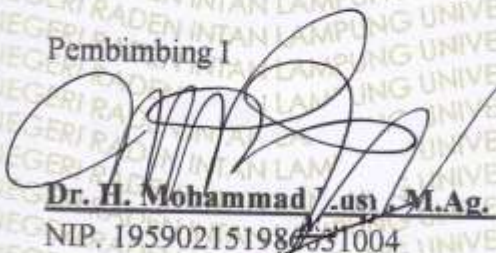
PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama
Nama : MUHAMMAD FUAD HASAN
Npm : 1621020420
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Syiasah Syar'iiyyah (Hukum Tata Negara)
Judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK PILIH
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)
DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Kritis Terhadap
Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu
dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018).

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. H. Mohammad I. usi, M.Ag.
NIP. 195902151980031004

Pembimbing II


Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M
NIP. 195703051978031001

Mengetahui
Ketua Jurusan


Freni, SE, M.Si
NIP. 198003122009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK PILIH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018) Disusun oleh : Muhammad Fuad Hasan, NPM 1021020420, Jurusan : Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara), Telah Diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Pada Hari.....2020.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si

Sekretaris : Fathul Mu'in, M.H.I

Penguji Utama : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag.

Pembimbing II : Drs. H. Ahmad Jalaludin, S.H., M.M

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



**A. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik
(Q.S An. Nisa (4) : 5).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta untuk Ayahku Zainal Abidin (Alm) dan Ibuku Nurhayati atas ketulusan mereka mendidik dan merawatku sejak dalam kandungan sampai aku sebesar ini. Berkat ketulusan doa keduanyaah penulis dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga gelar yang aku dapatkan akan menjadi kebanggaan bagi kedua orangtuaku.
2. Kepada kakak-kakakku Muhammad Fadli, Muhammad Faisal, Muhammad Fahmi, Muhammad Fariz yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
3. Kepada Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag dan Bapak Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penuis dalam menyelesaikan skripsi ini yang telah sabar membimbing dan memberi pengarahan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Nurmala Viatama yang selalu memberi motivasi dalam mengerjakan skripsin ini.
5. Sahabat-sahabatku Ahmad Rangga Wijaya, Bobby Maufal, Roni Rahmadi, Aliferdiansyah, Reza Kurnain Ramadandi, Budi Setiawan, Rifki, Amray Mandala, Royan Ananza, Ilham Wahyudi, Ade Tama, Ilham Sitorus, Raden, Tama, ,Yuden Nara, Reanita Agustina, Iin Yusmina, Yul,Aini,Meisi dan semua yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk kalian yang selalu memotivasiku dan membantuku dalam setiap keadaan.
6. Teman-temanku satu angkatan 2016 di Siyasah I terimakasih karena kalianlah masa kuliahku berarti dan penuh warna.
7. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhamad Fuad Hasan dilahirkan di Bandarlampung, pada tanggal 06 Juni 1998 sebagai anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Zainal Abidin dan Ibu Nurhayati.

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2003 di Taman Kanak-kanak (TK) Taruna Jaya Way Halim Bandar Lampung dan diselesaikan tahun 2004. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SDN 2 Way Halim Permai hingga 2010. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 12 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Utama 2 Bandarlampung, diselesaikan pada tahun 2016.

Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Program Strata 1 (satu) jurusan Siyasah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, Yang maha kuasa yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hudayah-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Pemilihan Umum (Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018)”. Sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Siyasah Syari’yyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan yang terbatas. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Sariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Hervin Yongky Pradikta, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Syar’iyyah UIN Raden Intan Lampung.
5. Kepada Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag dan Bapak Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penuis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan daerah provinsi Lampung atas diperkenalkannya peneliti meminjam literatur yang di butuhkan.
8. Kepada Zainal Abidin (Alm) dan Ibundaku Nurhayati yang selalu memberikan doa, perhatian, dan dukungannya, serta kasih sayang dan semangat.
9. Saudara-saudariku tercinta, yang selalu meberikan dukungan dan semangat kepadaku
10. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, demi terwujudnya kelulusan ini. Allah maha adil, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya harapan-harapan penulis, skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Siyasah Syari'yyah.

Bandar Lampung, 2020
Penulis,

Muhammad Fuad Hasan
NPM 1621020420

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikansi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah	16
B. Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah	19
a. Mekanisme Pemilihan pemimpin dalam Islam	28
C. Hak Politik Warga Negara	28
D. Kemampuan, Macam-Macam dan Faktor Penghapusan Politik	30
a. Pengertian kemampuan (<i>Ahliyah</i>).....	30
b. Macam-Macam Kemampuan (<i>Ahliyah</i>)	31
c. Sebab-Sebab Hilangnya Keahlian (<i>Ahliyah</i>)	37
E. Syarat-Syarat Seorang Dapat Memilih Dalam Islam	45
F. Tinjauan Pustaka	47

BAB III HAK PILIH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT UU PEMILU & PERATURAN KPU

A. Pemahaman Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	51
--	----

B. Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Pemilu & Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018.....	55
C. Sistem Pemberian Suara Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa dalam Pemilihan Umum	62

BAB IV ANALISIS

A. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 & PKPU Nomor 37 Tahun 2018.....	66
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan dalam memahami skripsi ini.

Skripsi ini berjudul : “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Pemilihan Umum (Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018)”.

Untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan istilah atau kata-kata yang penting dalam judul tersebut yang berdasarkan teori dengan sumber-sumber yang dapat di pertanggung jawabkan bagi para pembaca sebagai berikut :

Tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau”, yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.¹

Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 951.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), h. 4.

Hak Pilih atau kadang-kadang disebut hak pilih suara adalah hak penduduk untuk memilih. Dalam masyarakat yang demokratik, penduduk yang usianya diatas batas boleh memilih dalam pemilihan umum.

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.³

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Selanjutnya disebut pemilu.

Berdasarkan beberapa penegasan maka yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu kajian mengenai fiqh siyasah terhadap hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGD) dalam pemilihan umum.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah antara lain :

1. Alasan Objektif

- a. Karena Hak Pilih Merupakan bagian dari Hak Asasi, Hak memberikan suara atau memilih merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 *Tentang kesehatan Jiwa*, Pasal 1 Ayat (3)

⁴ Nadir, Ahmad, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, (Malang: Averroes Press, 2006), h. 89.

- b. Tidak adanya batasan hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilihan umum dalam Undang-Undang 07 Tahun 2017 dan Peraturan KPU, Sehingga terjadi kekosongan hukum terhadap hak pilih orang dengan gangguan jiwa dalam pemilihan umum.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul ini sangat relevan pembahasannya dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni dan belum pernah dibahas oleh mahasiswa dilingkungan Fakultas syar'iah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Refrensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan ini.

C. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan pintu gerbang untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mendapatkan legitimasi luas dari masyarakat. Jika pemilu dilaksanakan secara demokratis, adil, jujur langsung dan rahasia, maka terwujudnya pemilu yang berkualitas sangat tergantung bagaimana tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara baik. Tahapan tersebut meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.⁵

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintahan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip

⁵ Ramlan surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 28.

kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum pun harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.⁶

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab: pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dalam jangka waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai suatu kebijakan negara. Kedua, kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika internasional ataupun dari faktor dalam negeri sendiri, baik faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat memungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (*new voter*) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri.⁷

Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum (*general election*) merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam

⁶ Prof. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 420.

⁷ *Ibid* h. 416.

rangka melaksanakan hak asasi warga negara.⁸ Pemilihan Umum adalah merupakan (*conditio sine quanon*) bagi suatu negara demokrasi modern, yaitu rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian politik untuk menetapkan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.⁹

Perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia kembali menjadi perbincangan menarik di penghujung tahun 2018 muncul satu fenomena yang menarik untuk dibahas yaitu berkaitan dengan hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu. Fenomena tersebut muncul ketika Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merubah peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018 dengan peraturan KPU Nomor 37 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam Peraturan KPU Nomor 37 tahun 2018 yaitu adanya jaminan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.bahwa:

⁸ Moh kusnardi,Harmaily ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara, cet.V*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1993), h. 28.

⁹ Miriam Budiarmo, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, (Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, 1990), h.37.

Bunyi Pasal 4 adalah sebagai berikut : ¹⁰

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.
2. Pemilih Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Harus Memenuhi Syarat :
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
 - b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el.
 - e. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Namun Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 telah mengalami perubahan yakni dengan digantikan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 tepatnya pada pasal 4. Adapun isi bunyi mengenai hak memilih, yaitu:

¹⁰ PKPU Nomor 11 Tahun 2019, *Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Pasal 4

Bunyi Pasal 4 sebagai berikut :¹¹

- 1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- 2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
 - b. Dihapus
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Berdomisili diwilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el
 - e. Dalam hal Pemilih yang belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Dihapus
- 4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Dalam perubahan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018, dihapusannya syarat pemilih sedang terganggu jiwanya/ingatannya.

Di dalam pemilihan umum terdapat hak memilih dan dipilih adapun yang dapat memilih dalam pemilihan umum yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.

Bunyi pasal 198, hak memilih :¹²

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17(tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak pilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daftar 1 (Satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.

¹¹ Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018, *Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018*, Pasal 4

¹² Lihat, Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 , *Tentang Pemilihan Umum*, Pasal 198

3. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak Politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Kedudukan hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa atau penyandang disabilitas mental baik dalam Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU tidak mengaturnya atau tidak memberi batasan hak bagi orang dengan gangguan jiwa untuk ikut serta memilih dalam pemilihan umum.

Berkenaan dengan syarat pemilih dalam pemilihan pemimpin dalam Islam. Menurut Imam Al-Mawardi, syarat-syarat pemilih yang paling pokok adalah: (1) memiliki integritas moral yang baik, dan (2), memiliki pengetahuan atau informasi yang cukup mengenai calon pemimpin yang hendak dipilihnya. Dengan dua kualitas pemilih ini diharapkan terpilih seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyatnya, mampu memimpin dengan baik, mengayomi, melindungi, dan menjamin keamanan dan kesejahteraan mereka, baik lahir maupun batin.¹³

Pemilihan pemimpin dalam Islam dapat diartikan dengan bai'at. Jadi bai'at adalah pilihan rakyat atas imam, bersama dengan kepastian hak dan kewajiban timbal balik antar rakyat dan penguasa. Menurut Ibnu Khaldun di dalam kitabnya menyatakan, bai'at adalah janji untuk taat. Seolah orang yang berbaiat itu berjanji kepada pemimpinnya untuk menyerahkan kepadanya segala kebijakan terkait urusan dirinya dan kaum muslimin. Tanpa sedikitpun berkeinginan

¹³ Al-Mawardi, *Al-ahkam As-Sulthaniyyah*, Penerjemah Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006, h. 4

menentanginya. Serta taat pada perintah pemimpin yang dibebankan kepadanya, suka maupun tidak suka.¹⁴

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan meneliti dan mengkaji hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 07 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2018 ditinjau dari fiqh siyasah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka dapat dibuat beberapa rumusan yang akan menjadi bahasan, yaitu :

1. Bagaimana hak pilih bagi orang yang terkena gangguan jiwa menurut Undang-Undang 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum?.
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah perihal hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum?.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

¹⁴ Ibnu Khaldun, *Muqadimmah*, Penerjemah Ahamdie Thoha (Jakarta, Pustaka Firadaus, 2002), h. 299.

1. Untuk mendeskripsikan hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilihan umum menurut Undang-Undang 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU .
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilihan umum.

G. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan fokus kajian dan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teortis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai khazanah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum tata negara.
 - b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang hukum, Khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam di lingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan pembendaharaan pustaka dalam ilmu hukum tata negara.
 - c. Untuk menambah refrensi bahan literatur atau pustaka khususnya dalam memahami hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi.
 - b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum tata negara disetiap perguruan tinggi di fakultas syariah dan hukum.

- c. Diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan perihal hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang cepat melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁵ Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah “cara berfikir dan membuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian”.¹⁶

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data. Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu menghantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian dan sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan Literatur

¹⁵Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet.VII, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h.24.

¹⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet.VII, (Bandung : Mandar Maju, 1996), h.15.

(Kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹⁷ Dalam hal ini penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku dan Undang-Undang yang berkaitan dengan putusan dengan hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu dan pandangan hukum Islam terhadapnya.

Dilihat dari sifatnya, Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi acuan perilaku setiap orang, norma yang berlaku itu berupa hukum positif tertulis.¹⁸ Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Penelitian ini mencakup penelitian pada taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal sesuai dengan hierarki perundangan-undangan maupun undang-undang sederajat yang mengatur bidang yang sama. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum yang mengenai hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilihan umum.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian. Yang berasal dari : Al-Qur'an,

¹⁷ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 10

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52

Hadist, buku-buku fiqh, serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Yakni data yang dapat menunjang penelitian ini, yang berupa Undang-Undang, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, catatan atau laporan historis yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, buku-buku literatur, jurnal-jurnal, makalah surat kabar, artikel-artikel ilmiah, karya-karya ilmiah dan peraturan-peraturan perundangan-perundangan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut :

¹⁹ Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2013), h. 13

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan yang bersifat koreksi, sehingga kekurangan dapat dilengkapi dan diperbaiki.²⁰

b. *Koding*

Koding adalah memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits atau buku-buku literatur lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.²¹

c. *Rekontruksi Data*

Rekontruksi Data adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.

d. *Sistemasi Data*

Sistemasi Data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²²

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih satu sama lain, efektif

²⁰ Susiadi, *Metode penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung. h. 12

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 107

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Kompensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang tertinggal, semuanya masuk dalam analisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan²³



²³ *Ibid*, h. 127.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tarmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²⁴ Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah).²⁵

Kata *siyasah* yang berasal dari *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian pembahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin membuat kebijaksanaan pemerintah dan politik. Didalam buku fiqh siyasah karangan Muhammad Iqbal yang mengutip pendapat Abdul Wahhab Khallaf bahwa secara terminologis siyasah ialah “pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban, kemashalatan serta mengatur keadaan”, berdasarkan penjelasan diatas

²⁴ Amir Syafiruddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2003), h.5

²⁵ Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : RajaGrafindo, 1994), h. 21

dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan kepengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dan mencapai kemashalatan bagi manusia itu sendiri.²⁶

Ruang Lingkup *fiqh siyasah* dibagi menjadi 3 bagian:²⁷

- a. *Siyasah Dusturiyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan).
- b. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Luar Negeri).
- c. *Siyasah harbiyyah* (Politik Keuangan dan Moneter).

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang). Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁸

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2014), h. 4

²⁷ *Ibid*, h. 15

²⁸ *Ibid*, h. 177.

kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan realisasi kemashalatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁹

Dalam Kajian *Fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasri'iyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*), dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.³⁰

Unsur-Unsur legislasi dalam *fiqh siyasah* dapat dirumuskan sebagai berikut :³¹

²⁹ Prof. H. A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemashalatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 47

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 187

³¹ *Ibid*, h. 187

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakan.
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.

Jadi, dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tasri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyahnya* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakatnya Islam demi kemashlahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam.

B. Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah

Di dalam sistem politik umat Islam di masa klasik, sirkulasi kekuasaan tidak ditentukan oleh Pemilu dengan prosedur-prosedur yang ketat. Prinsip yang disediakan dalam doktrin Islam adalah syura (musyawarah). Kata (syura) berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.³² Sejalan dengan pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan.

Sebagaimana firman Allah Swt Qs. Al-Syura (42) ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

³² Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut : Dar' al-shadir, 1968), Jilid 4, h. 434.

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Qs. Al-Syura (42) : 38).

Dan Firman Allah Qs. Al-Imran (3) ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Qs. Al-Imran (3) : 159).

Ayat ini Allah memberi perintah pada Nabi untuk bermusyawarah agar bisa mendapatkan pandangan yang berbeda dari ide dan solusi dari orang lain, musyawarah akan menghasilkan sebuah keputusan yang matang dan tidak tergesa-gesa, Hubungan ayat ini dengan judul yaitu pentingnya bermusyawarah dalam membuat suatu peraturan atau Undang-Undang (Urusan Politik).

Syura merupakan sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang digunakan sebagai prinsip yang harus di tegakkan di muka bumi ini. Syura adalah prinsip yang menegaskan bahwa sirkulasi kekuasaan dapat dibicarakan. Mengenai cara bermusyawarah, lembaga permusyawaratan

yang perlu dibentuk, cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan putusan musyawarah, dan aspek-aspek tata laksana lainnya diserahkan kepada kelompok manusia bersangkutan untuk mengaturnya. Jadi sebagai prinsip, musyawarah adalah syariat. Pemahamannya termasuk bidang fiqh pengaturannya termasuk siyasah syar'iyah.³³

Dalam Praktiknya Nabi Muhammad Saw sering bermusyawarah dengan sahabat-sahabat dalam banyak hal. Karena itulah, dalam praktik politik umat Islam, musyawarah yang telah menjadi prinsip dalam bernegara diejawantahkan oleh para sahabatnya. Ada tiga periode besar dalam sejarah politik umat Islam. Periode pertama adalah periode sirkulasi kekuasaan para Khulafa' al-Rasyidin. Sejak Khalifah Abu Bakar hingga Khalifah Ali bin Thalib, sirkulasi kekuasaan dilaksanakan secara bermusyawarah, meskipun tidak menggunakan sistem Pemilu seperti apa yang sekarang ini di praktikan. Pemilihan Khalifah Abu Bakar dalam sejarahnya dilakukan oleh golongan Anshor di pertemuan Safiqah Bani Sa'idah. Khalifah Umar, Ustman, dan Ali juga dipilih berdasarkan musyawarah para sahabat besar (*kibar al sahabat*). Mereka adalah tokoh-tokoh yang dapat mewakili dan mendapat kepercayaan dari umumnya kaum muslimin. Mereka dalam bahasa al-Mawardi adalah *Ahlu al-ihtiyar*, *ahlu al-syura*.

Periode Kedua adalah sirkulasi kekuasaan yang turun-menurun dalam sistem kerajaan Islam. Periode ini diejawantahkan dalam sistem

³³ Ahmad Sukaraja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 158.

pemerintahan Bani Umayyah, Abassiyah, dan Utsmaniyyah. Periode ketiga adalah sirkulasi kekuasaan di zaman sekarang yang beragam karena ada negara yang berbentuk kerajaan dan republik.

Berdasarkan pengalaman sejarah politik umat Islam dimasa klasik, tidak ada prinsip yang menegaskan bahwa pemilihan Kepala Negara secara buku dalam satu sistem ,melainkan diberikan kewenangan kepada masyarakat Islam di zamannya untuk mengembangkan sistem pemilihan yang sesuai. Ini adalah masalah *Siyasah* (politik) yang terus berkembang.³⁴

Pemilihan pemimpin dalam Islam dapat diartikan dengan bai'at. Jadi bai'at adalah pilihan rakyat atas imam, bersama dengan kepastian hak dan kewajiban timbal balik antar rakyat dan penguasa. Menurut Ibnu Khaldun di dalam kitabnya menyatakan, bai'at adalah janji untuk taat. Seolah orang yang berbaiat itu berjanji kepada pemimpinnya untuk menyerahkan kepadanya segala kebijakan terkait urusan dirinya dan kaum muslimin. Tanpa sedikitpun berkeinginan menentangnya. Serta taat pada perintah pemimpin yang dibebankan kepadanya, suka maupun tidak suka.³⁵

³⁴ Ibid, h. 158-160

³⁵ Ibnu Khaldun, *Muqadimmah*, Penerjemah Ahamdie Thoha, h. 299.

Sebagaimana Firman Allah Qs. An. Nisa' (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Qs. An. Nisa' (4) : 59.

Abu ja'far al-Thabari mengomentari ayat ini, “pendapat yang paling utama dan benar dalam hal ini, mereka yaitu para pemimpin yang kepada Allah ketaatan dan bagi kaum muslimin kebaikan *mashlahat*. Imam Abu Bakar bin al-Arabi berkata “pendapat yang benar menurutku, mereka adalah para pemimpin dan ulama. Adapun para pemimpin, dikarenakan sumber urusan hukum berasal dari mereka, sedangkan ulama karena pada mereka hukumnya wajib atas makhluk. Jawaban mereka mengikat dan menunaikan fatwa mereka wajib.”³⁶

Sedangkan menurut ijma' ulama kewajiban mengangkat pemimpin adalah :

³⁶ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta : Gozian Press, 2013), h. 73

1. Imam Al-Mawardi menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.³⁷
2. An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwasanya wajib atas kaum muslimin memilih dan mengangkat pemimpin.
3. Ibnu Khaldun lebih tegas mengatakan bahwa menegakkan imamah hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam syari'at serta konsensus para sahabat dan tabi'in.

Mekanisme pemilihan pemimpin dalam sejarah umat Islam tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun Al-Hadits, Nabi Muhammad *Shalallaahu 'alayhi wa sallam* tidak pernah menunjuk atau memberikan mandat untuk menggantikan beliau sebagai pemimpin. Sehingga mekanisme pemilihan pemimpin setelah beliau wafat dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda. berikut beberapa mekanisme dalam mengangkat pemimpin:

a) Pemilihan dengan *Bai'at Ahlul Halli Wal Aqdi*

Pemilihan dengan cara memilih seorang yang di anggap memenuhi syarat sebagai calon pemimpin atau yang lebih dikenal dengan *Bai'at Ahlul Halli Wal Aqdi*. Ulama berbeda pendapat soal jumlah minimum *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

Pendapat pertama mengatakan bahwa seseorang dapat diangkat secara sah sebagai pemimpin apabila suara *Ahlul Halli Wal Aqdi* seluruh

³⁷ Munawir Sadjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1990). h 78

negeri pada pengangkatan tersebut adalah suara mayoritas. Suara mayoritas dari *Ahlul Halli Wal Aqdi* ini menandakan adanya penerimaan secara tulus dan pengakuan secara umum atas kepemimpinan pemimpin.

Pendapat kedua mengatakan bahwa jumlah *Ahlu Halli Wal Aqdi* yang dapat mengesahkan seorang pemimpin minimal 5 (lima) orang yang sepakat, atau satu (1) orang membaiaat lalu disetujui oleh empat (4) orang lainnya. Alasan pertama, merujuk pada pengangkatan Abu Bakar sebagai pemimpin untuk menggantikan Rasulullah *Shalallaahu 'alayhi wa sallam*. Ketika itu baiat Abu Bakar dilakukan oleh lima (5) orang sahabat yaitu: Umar bin Khaththab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid bin Hudhair, Basyar bin Sa'ad, dan Salim Maula Abi Huzaifah. Alasan kedua, yaitu pengangkatan Utsman bin Affan sebagai pemimpin dimana sebelum meninggal Umar bin Khaththab membentuk *syuro* di dalam *Ahlu Halli Wal Aqdi* sebanyak enam (6) supaya memilih salah satu dari enam orang sahabat tersebut. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha dan *mutakallimin* dari Bashra.

Pendapat ketiga mengatakan bahwa baiat pemimpin bisa dilakukan hanya satu (1) orang *Ahlu Halli Wal Aqdi*. Landasan pendapat ini adalah ketika Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib ketika membaiaatnya sebagai pemimpin: “bentangkan tanganmu, aku membaiaatmu” dan ketika itu umat Islam secara umum menerima *bai'at* Abbas bin Abdul Muthalib terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tersebut.

Terjadinya beberapa *ikhtilaf* di kalangan ulama tersebut menandakan bahwa tidak ada parameter yang baku dalam menentukan berapa jumlah *Ahlu Halli Wal Aqdi* untuk dapat mengesahkan pengangkatan pemimpin. Jumlah *Ahlu Halli Wal Aqdi* bukanlah sebuah perhitungan yang baku, namun pemilihan tersebut dipengaruhi oleh kondisi pemerintahan yang ada saat itu. Hal ini jelas tercermin dalam pengangkatan para *Khulafur Arrasyiddin* dimana mereka memiliki sistem baiat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada.³⁸

b) Pemilihan dengan Cara *Wilayah al-'Ahd* atau *Istikhlaf* (Penyerahan Mandat dari Pemimpin Sebelumnya)

Mekanisme penyerahan mandat ataupun tonggak kepemimpinan dari suatu pemimpin ke pemimpin berikutnya merupakan sebuah mekanisme yang diperbolehkan dalam Islam ketika mengangkat pemimpin.³⁹ Pengangkatan ini juga sering disebut dengan penunjukan atau wasiat seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika menunjuk Umar bin Khaththab sebagai penggantinya di kemudian hari. Hal yang menarik dari penunjukan Abu Bakar kepada Umar adalah ketika beliau mengatakan: “Sesungguhnya aku tidak melakukan penunjukan ini kecuali semata-mata karena kebaikan yang aku inginkan. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak menginginkan semua itu kecuali kebaikan bagi mereka semuanya (rakyat), dan aku sangat takut terjadi fitnah di tengah-tengah

³⁸ Ahmad Sadzali, *Pengangkatan Kepala Negara* (Jogjakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2018), h. 15-17

³⁹ *Ibid*, h. 19.

mereka”. Pengangkatan pemimpin dengan penyerahan mandat merupakan salah satu cara yang disepakati ulama sebagai cara yuridis.⁴⁰

c) Pemilihan dengan Cara Kudeta

Pada prinsipnya, mekanisme ini termasuk mekanisme yang tidak disyariatkan, bahkan dilarang dalam hal pengangkatan seorang pemimpin. Makanya, tidak boleh ditempuh melainkan dalam kondisi-kondisi darurat demi kemashlahatan kaum muslimin. Adapun yang dimaksud dari kudeta itu sendiri adalah suatu cara penggulingan kekuasaan atau pengambilalihan kekuasaan secara paksa dari tangan pemimpin dan dapat dilakukan oleh golongan tertentu baik militer atau tentara maupun sipil serta dilakukan secara keras karena ada unsur paksaan.

Para fuqaha berpendapat, kepemimpinan dianggap sah melalui mekanisme ini, walaupun orang yang naik sebagai pemimpin setelah melakukan kudeta tidak terpenuhi padanya syarat-syarat seorang muslim, seperti jahil atau fasik, selama ia adalah seorang muslim.

Jika pemimpin meninggal karena proses kudeta, lalu naik ke puncak kepemimpinan seorang pengganti yang terpenuhi padanya syarat-syarat kepemimpinan melalui proses penunjukan dan tidak pula bai'at, serta memimpin manusia melalui kekuatan militernya, di anggap sah kepemimpinannya, dan wajib mentaatinya. Adapun jika tidak terpenuhi padanya syarat-syarat bagi seorang pemimpin, seperti ia orang jahil atau

⁴⁰ Lukman Arake, “Sistem Pengangkatan Presiden dalam Fikih Siyasah”, *Jurnal Ahkam* , Vol. XV, No 1 (Januari 2015) h. 53

fasik. Kepemimpinannya tetap dianggap sah.⁴¹ Alasan para fuqaha menyatakan hal tersebut karena seandainya dikatakan tidak sah maka dikhawatirkan terjadinya pertumpahan darah yang lebih dahsyat dari kedua belah pihak yaitu yang dikudeta dan yang mengkudeta.

Agar kepemimpinan yang direbut dengan cara kudeta dapat diakui dan sah secara hukum Islam maka para ahli tata negara Islam menyatakan bahwa hal tersebut harus diperkuat dengan dua yaitu unsur *waqi* dan unsur *syar'i*. Unsur *waqi* dapat diartikan sebagai suatu kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin yang merebut kekuasaan dengan cara kudeta. Dengan kekuatan tersebut dia dapat menguasai semua wilayah yang masuk dalam kepemimpinannya. Yang kedua adalah unsur *syar'i* yaitu adanya pengakuan dari masyarakat terkait dengan kepemimpinan itu sendiri.

Sejarah Islam, diceritakan bahwa kudeta pemimpin pernah terjadi, seperti apa yang dilakukan Abdullah bin Zubeir. Beliau sebagai tokoh ulama di zamannya telah melakukan gerakan kudeta pemimpin yang saat itu memerintah dengan zalim dan kejam, Al-Hajjaj bin Yusuf.

d) Pemilihan dengan Cara Monarki (Turun Temurun)

Pengangkatan pemimpin melalui sistem monarki dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Muawiyah telah mengubah model kekuasaan dengan model kerajaan, kepemimpinan diberikan pada putra mahkota.⁴²

⁴¹ *Ibid*, h. 57

⁴² “Dinasti Umayyah, Pemerintahan Monarki Pertama dalam Islam” (On-line), tersedia di <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/08/12/m8jlui-dinasti-umayyah-pemerintahan-monarki-pertama-dalam-islam-4>. (20 April 2020)

C. Hak Politik Warga Negara

Terdapat beberapa pendapat dari ahli politik tentang hak-hak politik. Menurut Al-Maududi paling tidak ada enam macam hak politik yang diakui dalam Islam, yaitu:⁴³

1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pokok pikiran, pendapat, keyakinan. Hal ini lanjut Maududi, meliputi hak kebebasan untuk mengkritik pemerintah dan pejabatnya, termasuk kepala negara.
2. Hak untuk berserikat dan berkumpul.
3. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara.
4. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan negara.
5. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai ketua atau anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR).
6. Hak untuk memberikan suara dalam pemilu.

Dengan rincian yang agak sedikit berbeda, Abd- al-Karim Zaidan juga mengemukakan enam macam hak politik yang bisa dinikmati oleh rakyat/warga negara sebuah komunitas Islam. Keenam hak politik yang dimaksud itu adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara, baik langsung maupun melalui perwakilan,
2. Hak musyawarah/hak untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan ide, saran, dan kritik yang konstruktif kepada para penyelenggara

⁴³ Mujaer Ibnu Syarif, *Hak Hak Politik Minoritas Nonmuslim dalam Komunitas Islam : Tinjauan dari perspektif Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2003) Cet 1, h. 65

⁴⁴ *Ibid*, h.54

negara terpilih, utamanya kepala negara, agar tidak melakukan hal-hal yang membahayakan umat/rakyat,

3. Hak pengawasan/hak untuk mengontrol dan meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara,
4. Hak memecat atau mencopot kepala negara dari jabatannya bila tidak dapat menjalankan dengan baik tugas yang di amanatkan umat/rakyat kepadanya,
5. Hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan kepala negara/presiden, dan
6. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan.

Mengenai hak politik yang terakhir, yakni hak untuk menduduki jabatan-jabatan umum tertentu dalam pemerintahan Abd al-karim Zaidan berkomentar, siapa saja yang memiliki keahlian punya hak untuk duduk dalam jabatan- jabatan umum pemerintahan. Siapapun yang cocok, mesti ditunjuk tanpa memandang ada atau tidaknya hubungan kekerabatan dan atau yang lainnya. Bila dalam proses pengangkatan tersebut terdapat unsur-unsur kolusi dan nepotisme, pelakunya dipandang telah melakukan pengkhianatan dan menghancurkan amanat yang dipercayakan kepadanya, yang antara lain menuntutnya melimpahkan jabatan-jabatan kenegaraan umum kepada orang- orang yang tidak tepat.

D. Kemampuan, Macam-macam dan Faktor Penghapusan Hak Politik dalam Hukum Islam

1. Pengertian Kemampuan Keahlian (*Ahliyah*)

Dari segi etimologi *ahliyah* berarti yaitu “kecakapan menangani suatu urusan”, semisalnya seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan/posisi, berarti dia mempunyai kemampuan untuk itu.³² Secara istilah, para ahli ushul fiqh mendefinisikan *ahliyah* dengan “Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan oleh syar”i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara”.

Maksudnya, *ahliyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalannya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain, atau transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain.

Melalui definisi di atas ini dipahami bahwa *ahliyah* merupakan sifat yang mengindikasikan seseorang telah sempurna jasmani dan akalannya sehingga semua perbuatannya dapat dikenai taklif.

2. Macam-macam Kemampuan (*Ahliyah*)

Ulama ushul membagi keahlian ini kepada dua bagian.

- a) *Ahliyah al-Wujub*, yakni kelayakan seseorang untuk ada padanya hak dan kewajiban. Dasar dari *ahliyah* ini adalah sebab-sebab

³² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 151.

husus yang dijadikan Allah pada manusia. Sebab khusus itu oleh para *fuqaha* disebut *al-zimmah*, yaitu sifat firiyah insaniyah yang ada pada setiap manusia, baik laki-laki atau perempuan, janin atau anak-anak, mumayyiz atau baligh, pintar atau bodoh, waras atau gila, dan sakit atau sehat.⁴⁵ Pokoknya, selama ia disebut manusia, selama itu pulalah keahlian itu ada padanya. Dengan kata lain, keahlian wujud adalah kemanusiaanya itu sendiri. Tidak ada manusia yang tidak memiliki *ahliyyah al-wujub*, karena *ahliyyah al-wujûb* adalah sifat kemanusiaannya. Para ahli *ushul fikh* membagi *ahliyyah al-wujûb* kepada dua bagian, yaitu:

(1) *Ahliyyah al-wujub al-naqishah*

Atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak.⁴⁶ Sifat lemah pada kecakapan ini disebabkan oleh karena hanya salah satu kecakapan pada dirinya diantara dua kecakapan yang harus ada padanya.

Contoh kecakapan untuk menerima hak, tetapi tidak untuk menerima kewajiban adalah bayi dalam kandungan ibunya. Bayi atau janin itu telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat meskipun ia belum lahir. Realisasi dari hak itu berlaku setelah ternyata ia lahir dalam keadaan hidup. Bayi

⁴⁵ *Ibid*, h. 151.

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) h. 192.

dalam kandungan itu tidak dibebani kewajiban apa pun, karena secara jelas ia belum bernama manusia.

Contoh kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak cakap menerima hak adalah orang yang meninggal dunia tetapi masih meninggalkan hutang. Dengan kematiannya itu ia tidak akan mendapatkan hak apa pun lagi, karena hak hanyalah untuk manusia yang hidup. Tetapi ia tetap dikenai kewajiban untuk membayar hutang yang dibuatnya semasa ia masih hidup. Kewajiban itu tentunya yang menyangkut harta benda yang dapat dilakukan oleh orang lain

(2) *Ahliyyah al-wujub al-kamilah*

Atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak.⁴⁷ Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kepantasan berlaku untuk keduanya sekaligus. Kecakapan ini dimiliki oleh setiap orang sejak dilahirkan. Yakni sejak usia kanak-kanak, usia mumayyiz, sampai sesudah usia baligh (dewasa), dalam keadaan dan kondisi lingkungan yang bagaimanapun.

Contoh *ahliyyah al-wujub al-kamilah* adalah anak yang baru lahir, disamping ia berhak secara pasti menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya, ia juga telah dikenai kewajiban

⁴⁷ *Ibid*, h. 193.

seperti zakat fitrah yang pelaksanaannya dilakukan oleh orang tua atau walinya. Demikian pula orang yang sedang berada di ujung kematian (*sakarāt al-maut*). Disamping ia berhak menerima harta warisan dari orang tua atau kerabatnya yang lebih dulu meninggal, ia juga dibebani kewajiban zakat atas hartanya yang telah memenuhi syarat untuk dizakatkan.

- b) *Ahliyah al-Ada'*, yaitu kelayakan seorang mukallaf untuk dianggap sah segala ucapan dan tindakannya menurut syara'. Artinya, apabila itu seseorang mukallaf melakukan suatu tindakan, tindakan itu dianggap sah menurut syara' dan mempunyai konsekuensi hukum.⁴⁸ Misalnya, bila ia mengadakan transaksi bisnis, tindakannya itu dipandang sah dan ada konsekuensi hukumnya. Bila ia melakukan shalat, puasa atau melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya, perbuatannya dianggap sah oleh syara "bila cukup rukun dan syaratnya dan menggugurkan kewajiban *mukallaf* tersebut". Begitu juga bila ia melakukan pelanggaran terhadap orang lain, ia akan dikenai sanksi hukum pidana, baik pidana badan maupun harta. Pokoknya, *ahliyah al-ada'* adalah soal pertanggungjawaban yang didasarkan oleh akal atau kecakapan pribadi.

Kecakapan berbuat hukum atau *ahliyah al-adâ'* terdiri dari tiga tingkat. Setiap tingkat ini dikaitkan kepada batas umur

⁴⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, h. 152

seorang manusia. Ketiga tingkat itu adalah:

(1) *Adim Al-Ahliyyah* (tidak memiliki kecakapan)

Adapun yang dimaksud dengan *adim al-ahliyyah* yaitu seseorang yang sama sekali tidak memiliki kecakapan bertindak secara hukum.⁴⁹ Mereka ini adalah yang berusia antara nol sampai mencapai umur *tamyiz* sekitar umur tujuh tahun. Pada usia ini seorang anak belum sempurna akal nya atau belum berakal, sedangkan *taklif* dikaitkan kepada sifat berakal. Karena itu anak semumur ini belum disebut mukallaf atau belum dituntut melaksanakan hukum. Selain anak kecil, keadaan ini juga dimiliki oleh orang yang gila sebab akal nya juga tidak sempurna. Keduanya tidak dapat menimbulkan akibat hukum dalam ucapan maupun perbuatannya, akad dan pengelolaannya batal.

(2) *Ahliyyah Al-Ada' Al-Nâqishah* (kecakapan bertindak tidak sempurna)

Ahliyyah Al-Ada' Al-Nâqishah adalah seseorang yang sudah mencapai umur *tamyiz* (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan *naqishah* (lemah) dalam bentuk ini oleh karena akal nya masih lemah dan belum sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Mereka juga belum dipandang mukallaf, namun semua

⁴⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 193

perbuatan ibadahnya dipandang sah.

Adapun semua perbuatannya yang pasti menguntungkan baginya dipandang sah, meskipun tanpa persetujuan dari walinya, seperti menerima hibah dan wasiat. Sebaliknya semua perbuatannya yang pasti merugikan baginya, dipandang batal demi hukum, seperti memberi hibah dan berwasiat. Akan tetapi, jika ia melakukan transaksi atau akad yang berpeluang menimbulkan keuntungan atau kerugian, misalnya melakukan jual beli, maka keabsahan tindakannya itu tergantung pada persetujuan walinya.

(3) *Ahliyyah Al-Ada' Al-Kamilah* (kecakapan bertindak secara sempurna)

Yang dimaksud dengan *ahliyyah al-adâ'' al-kâmilah* yaitu seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna, yaitu yang telah mencapai usia dewasa, sehingga ia dipandang telah mukallaf.⁵⁰

Para ulama *ushul fikih* menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki *ahliyyah al-adâ''* adalah aqil, baligh dan cerdas. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. An.Nisa' (3) ayat 6:

⁵⁰ *Ibid*, h. 194,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ

Artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (Qs. An-Nisa'(4) : 6.

Menurut para ulama *ushul fikih*, kalimat “cukup umur” dalam ayat ini menunjukkan seseorang yang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan haid untuk wanita. Orang yang seperti ini telah dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga seluruh perintah dan larangan syara’ dapat ia pikirkan sebaik-baiknya dan dapat dapat ia laksanakan secara benar. Apabila perintah itu tidak ia laksanakan dan larangan tetap ia langgar, maka ia bertanggungjawab baik di dunia maupun di akhirat.

Dari penjelasan tentang *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al-ada’* di atas dapat diketahui bahwa semua manusia memiliki kecakapan secara hukum untuk dikenakan kewajiban dan diberi hak (*ahl li al-wujub*), tetapi tidak semua manusia dipandang cakap untuk bertindak secara hukum (*ahl li al-ada’*). Seseorang baru dipandang cakap bertindak secara hukum, apabila ia telah mencapai kedewasaan dari segi usia dan akal nya serta tidak

ditemukan cacat atau kurang pada akal nya. Dalam keadaan seperti ini barulah seseorang dapat disebut sebagai mukallaf.

3. Sebab-sebab Hilangnya Keahlian (*Awarid Ahliyah*)

Meskipun sejak lahirnya, seseorang telah memiliki kecakapan menerima kewajiban dan hak (*ahl li al-wujub*), dan sejak dewasa dari segi usia dan akal nya, memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum (*ahl li al-ada*), namun terkadang pada waktu tertentu terdapat faktor-faktor yang menghalanginya untuk dapat dipandang cakap bertindak secara hukum.

Faktor-faktor penghalang tersebut ada yang berasal dari dalam dirinya, dan ada pula yang berasal dari luar dirinya. Faktor-faktor penghalang itu disebut dengan istilah *awarid al-ahliyah* (penegasi-penegasi kecakapan) atau *mawani at-taklif* (penghalang-penghalang *taklif*).

Faktor-faktor penghalang *taklif* itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *al-awaridh as-samawiyyah* dan *al-awaridh al-muktasabah*.

a) *Al-awaridh as-samawiyyah*

Adapun yang dimaksud dengan *al-awaridh as-samawiyyah* ialah, halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari luar diri seseorang yang bukan merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya. Halangan ini terdiri atas beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:⁵¹

⁵¹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 101.

(1) Gila (*al-junun*)

Keadaan gila ialah, hilangnya akal untuk mempertimbangkan suatu tindakan logis. Gila menghalangi seseorang untuk berbicara dan bertindak wajar. Keadaan gila pada diri seseorang dapat dibedakan dari segi waktu, yaitu sebagai berikut:

- (a) Gila yang berlangsung dalam waktu yang lama dan berkelanjutan (*al-junun al-muabbad*). Keadaan gila ini menghilangkan kewajiban dalam ibadah yang bersifat fisik, seperti sholat dan puasa.
- (b) Gila yang berlangsung sementara dan tidak berkelanjutan (*al-junun al-muaqqaf*). Keadaan gila ini tidak menghalangi beban *taklif*.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ
الْمُبْتَلى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Artinya : “ Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang

gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig“.⁵²

(2) Lemah Akal (*al-'atah*)

Yaitu Kelemahan dalam akal sehingga meracau omongannya, kadang seperti omongan orang yang sehat, kadang seperti omongan orang yang gila dan begitu pula urusan-urusan yang lain. Hukum orang yang ma“tuh (kurang akal) sama dengan anak kecil dalam masa tamyiz dalam seluruh urusannya.

(3) Kelupaan (*An-Nis-yan*)

Yaitu tidak mampu menampilkan sesuatu dalam ingatan pada waktu diperlukan. Ketidakmampuan ini menyebabkan tidak ingat akan beban hukum yang dipikulnya. Adapun hak-hak yang menyangkut lupa ini berbagi menjadi dua, yaitu hak-hak Allah dan hak-hak manusia atau hamba. Hukum lupa berkaitan dengan kedua hak itu tidaklah sama. Dalam menyangkut hak manusia, hak tidak gugur karena lupa. Dengan kata lain, lupa tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindarkan diri dari suatu hak.

(4) Tidur

Yaitu halangan *taklif* bersifat temporer yang dalam waktu itu seseorang tidak dapat memahami tuntutan hukum. Keadaan orang tidur sama dengan keadaan orang jahil yang tidak punya kehendak dan tidak punya kesadaran. Oleh karena itu tertidur termasuk salah satu sebab diantara sebab-sebab tuntutan hukum sejauh yang menyangkut hak

⁵² HR. Abu Daud, Nomor 3882.

Allah.⁵³

(5) Pingsan

Yaitu halangan yang mencegah pemahaman khitob lebih banyak daripada pencegahan tidur terhadapnya, maka berlakulah padanya apa yang berlaku dalam keadaan tidur karena ia lebih banyak daripadanya, menjadikan membatalkan wudhu dalam keadaan bahkan dalam sholat.

(6) Penyakit

Penyakit tidak bertentangan dengan *ahliyah* hukum dan ibadah, karena tidak ada kekurangan dalam tanggungjawab, akal dan ucapan. Karna itu mengandung kelemahan disyariatkanlah ibadah menurut kadar kemampuannya.

(7) Haid dan Nifas

Haid dan Nifas ini tidak menggugurkan *ahliyah* kewajiban maupun penunaian. Tetapi ditetapkan bahwa bersuci merupakan syarat dari sahnya sholat dan puasa, maka tidak mungkin menunaikan keduanya. Tidak berlaku qadha sembahyang, karena mengandung kesempitan berlainan dengan puasa dan karna adanya larangan menunaikan puasa dalam keadaan haid dan nifas. Karena mustahil bahwa satu hal dari satu segi dilarang dan diwajibkan penunaianya, sedangkan qodho diwajibkan karena adanya sebab yaitu penyaksian bulan.

(8) Kematian

Kematian menggugurkan hukum-hukum dunia taklif seperti zakat,

⁵³ Amir Syarifuffin, *Ushul Fiqh I* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 370.

puasa dan haji dan lain-lainya, dan tinggallah dosa kewajiban yang disiasikannya.⁵⁴ Bila sebelum mati ada kewajiban berupa hak orang lain yang bersangkutan dengannya dalam bentuk meteri maka hak itu tetap berlaku selama materi itu masih ada. Seperti amanat, titipan, barang rampasan, dan barang yang dibeli belum dibayar. Yang dimaksud dengan kewajiban disini adalah kembalinya hak tersebut kepada pemiliknya. Ini harus berlaku meskipun yang berkewajiban sudah mati. Adapun bila orang yang mati mempunyai hutang dan meninggalkan harta maka wajib dibayar, dan orang yang mati mempunyai hutang dan tidak meninggalkan harta maka gugurlah tuntutan terhadap orang mati itu. Dalam hal ini menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani dan Imam Mujtahid berpendapat bahwa jaminan yang diberikan sesudah kematian adalah sah, karena orang mati bebas dari kewajiban membayar hutang. Karnanya ia dituntut menyelesaikan hutangnya bila ada hartanya. Bila ada penjamin untuk membayar hutang maka pihak berpiutang boleh mengambil.

b) *Al-awaridh al-muktasabah*

Adapun yang dimaksud dengan *al-mawaridh al-muktasabah* ialah halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari dalam diri seseorang yang merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya. Halangan ini terdiri atas beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

⁵⁴ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 105.

(1) Mabuk.

Yaitu tertutupnya akal disebabkan oleh meminum atau memakan sesuatu yang memengaruhi daya akal, baik dalam bentuk cairan atau bukan. Mabuk menyebabkan pembicaraan tidak menentu seperti igauan orang tidur dan secara fisik ia sehat.⁵⁵

(2) *Safih* (bodoh)

Yaitu kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan ia berbuat dalam hartanya menyalahi apa yang dikehendakai oleh akal yang sehat. *Safih* tidak meniadakan sesuatu pun dari hukum syara". Terhadapnya berlaku tuntutan syara", baik yang berhadapan dengan hak-hak Allah maupun yang berhadapan dengan hak-hak hamba karena ia mukallaf secara penuh. Apabila ia mengerjakan suatu kejahatan, ia dikenai oleh sanksi hukum sebagaimana yang berlaku terhadap orang yang tidak safih dengan tidak kurang sedikitpun. Safih dapat perlindungan syara" atas hartanya dari kerusakan hanya karena kelemahan pada dirinya.

Apabila sifat safih mengiringi kedewasaannya, ia dihalangi bertindak atas hartanya. Dalam hal ini para ulama bersepakat. Dasarnya adalah Firman Allah dalam Qs. An-Nisa (4) ayat 5 yang artinya :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

⁵⁵ Amir Syarifuffin, *Ushul Fiqh 1*, h. 371.

Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Qs. An.Nisa' (4) : 5).

(3) Jahil terbagi menjadi dua bentuk, Yaitu:

(a) Pengetahuan bersifat umum yang tidak mungkin seseorang mengatakan ketidaktahuannya, kecuali orang yang akal nya tidak memungkinkan untuk mengetahuinya; seperti shalat lima waktu, puasa Rhamadhan, ibadah haji dan zakat.

(b) Pengetahuan secara khusus yaitu menyangkut furu' ibadat atau pengetahuan yang tidak mungkin dicapai kecuali oleh orang-orang yang secara khusus mempelajarinya atau ulama.⁵⁶

(4) Perjalanan (*safar*)

Perjalanan tidaklah menyalahi *ahliyah* hukum, akan tetapi *As-Syar'i* menjadikannya sebab keringanan. Maka disyariatkan shalat dua rokaat dan diijinkan dalam perjalanan meninggalkan puasa. Walaupun perjalanan baru dimulai ia boleh berbuka atau berpuasa, tapi jika berbuka ia tidak perlu membayar khafarah karena kemungkinan timbulnya *syubhat*. Ditetapkannya qashar atas empat rokaat dengan sekedar memulai perjalanan bukan diharuskan sesudah menempuh perjalanan, karena perjalanan dianggap terwujud setelah berjalan selama tiga hari tiga malam atau jarak yang sama dengan itu.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, h. 375

⁵⁷ *Ibid*, h. 384

(5) Tersalah (*khatha*)

Yaitu menyengaja melakukan suatu perbuatan pada tempat yang dituju oleh suatu kejahatan. Umpamanya seseorang berkumur-kumur dalam keadaan sedang berpuasa, dan tanpa sengaja air masuk kedalam perutnya.

(6) Terpaksa/ Paksaan (*Ikroh*)

Ialah menghendaki seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginannya.⁵⁸ Atau menyuruh orang lain berbuat sesuatu yang tidak disenanginya baik perkataan maupun perbuatan, sehingga andaikata ia dibiarkan niscaya tidaklah dilakukannya. Dalam hukum terdapat dua kata yaitu ikhtiar dan ridho, yang dimaksud dengan ikhtiar yaitu mengutamakan pelaksanaan suatu perbuatan dari pada meninggalkannya dan ridho yaitu kesenangan melakukan sesuatu.

E. Syarat-Syarat Seorang Dapat Memilih Dalam Islam

Pemilih dalam *fiqh siyasah* dapat diartikan sebagai rakyat. Rakyat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penduduk suatu negara.⁵⁹ Rakyat dalam menjalani kehidupannya membutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengurus berbagai masalah yang ia hadapi. Dalam Islam, hubungan antara rakyat dengan pemimpin adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, rakyat wajib memilih seseorang yang

⁵⁸ Abd. Rahman Dahlan, h. 110

⁵⁹ Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2003, h. 1135

mampu dan layak menjadi pemimpin.⁶⁰

Umat Islam mempunyai hak untuk memilih, akan tetapi dalam melaksanakan haknya mereka harus memenuhi syarat sebagai pemilih. Adapun syarat-syarat yang diperlukan adalah seperti yang termaktub dalam Rancangan Undang-Undang Dasar (*Masyru Dustur*) Negara Islam Pasal 26, bahwa “Setiap Muslim yang Baligh dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan, berhak memilih dan membai’at *Khalifah*.”⁶¹

Adapun dalil Al-Qur’an bahwa berakal memenuhi kriteria sebagai pemilih terdapat dalam QS. Az-Zumar (39) ayat 18 :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya : (yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. (Qs. Az-Zumar (39) : 18).

Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-ahkam al-sulthoniyah*, memberikan syarat untuk bisa memilih seseorang pemimpin yaitu : (1) memiliki integeritas moral yang baik, (2) memiliki pengetahuan atau infomasi yang cukup mengenai calon pemimpin yang hendak dipilihnya. Dengan dua kualitas pemilih ini diharapkan terpilih seorang pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyatnya, mampu

⁶⁰ Yahya Ismail, *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah*, Penerjemah Andi Suherman (Gema Insani Press: Jakarta, 1995), h. 31

⁶¹ Sutisna, *Pemilihan kepala negara menurut Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Deepublish, 2014), h. 99

memimpin dengan baik, mengayomi melindungi, dan menjamin keamanan dan kesejahteraan mereka, baik lahir maupun batin.⁶²

Al-Mawardi menyebutkan *al-hall wa al-'aqd* dengan *al-ikhtiyar*, merekalah yang berhak memilih khalifah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *Ahl al-Ikhtiyar* (orang yang memiliki kualifikasi untuk memilih) ada tiga syarat:⁶³

- 1) Keadilan yang mencakup berbagai syaratnya.
- 2) Ilmu yang dapat mengantarkannya kepada pengetahuan tentang siapakah yang berhak memegang tampuk khilafah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 3) Pendapat yang sehat dan kebijaksanaan yang memungkinkan orang untuk mampu memilih orang yang paling pantas memegang tampuk khilafah.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah mengajukan konsep *al-syawkah* yaitu sebuah konsep yang hampir sama dengan *al-hall wa al-'aqd*. Menurutnya *al-syawkah* adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat. Mereka menjadi semacam “kata putus” bagi masyarakat. Merekalah yang memilih kepala negara.⁶⁴

⁶² Al-Mawardi, *Al-ahkam As-Sulthaniyyah*, h. 4.

⁶³ Satori Ahmad, *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016) h. 89

⁶⁴ Ibn Taimiyyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah), Jilid 2, h. 20

F. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian yang pertama temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Renaldi yang berjudul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/Puu-Xiii/2015 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif *Fiqh Siyasah*”. Fakultas Syari’ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Oktober 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan latar belakang putusan MK dan menganalisis putusan MK Nomor: 135/Puu-Xiii/2015 mengenai hak memilih dalam pemilu bagi orang yang terkena gangguan jiwa perspektif *fiqh siyasah*. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas hak pilih orang dengan gangguan jiwa dalam pemilihan umum. Perbedaannya penelitian ini yaitu berfokus pada putusan MK Nomor: 135/Puu-Xiii/2015 sedangkan penelitian peneliti ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2018.⁶⁵

Penelitian yang kedua peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ariza Rahmawati yang berjudul “Kriteria Dalam Pemilihan Kepala Negara Menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang

⁶⁵ Skripsi, Muhammad Renaldi, *Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/Puu-Xiii/2015 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqh Siyasah*, Institut Agama Islam Negeri , Palangka Raya, Oktober 2019.

Pemilu di Tinjau Dari *Fiqh Siyasah*”. Fakultas Syari’ah , Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Lampung, November 2018.

Tujuan dari penelitian ini ini adalah untuk mengetahui kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 dan untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap kriteria pemilih dalam pemilihan kepala negara menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017. Menurut Peneliti ketentuan Pasal 198 ayat (1) mengenai hak pilih warga negara yang berusia 17 tahun tapi sudah menikah masih rancu dan dipertanyakan apakah mereka dapat berpartisipasi sebagai pemilih atau tidak. Persamaan Penelitian di atas dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Perbedaannya dengan penelitian peneliti yaitu permasalahannya, permasalahan penelitian diatas mengenai hak pilih warga negara yang berusia 17 tahun tapi sudah menikah masih rancu dan dipertanyakan apakah mereka dapat berpartisipasi sebagai pemilih atau tidak, sedangkan penelitian peneliti mengenai hak pilih orang dengan gangguan jiwa dalam pemilihan umum Menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2018.⁶⁶

Penelitian yang ketiga yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Puji Rahayu yang berjudul “ Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

⁶⁶ Skripsi Ariza Rahmawati, *Kriteria Dalam Pemilihan Kepala Negara Menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Tinjau Dari Fiqh Siyasah*, Fakultas Syari’ah, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Lampung, November 2018.

Hak Pilih Anggota Polri Dalam Pemilu”. Fakultas Syari’ah , Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Lampung, November 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hak pilih polri dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan untuk mengetahui sudut pandang *Fiqh Siyasah* terhadap hak pilih polri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Persamaan Penelitian di atas dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap hak pilih dalam pemilu , dan perbedaan penelitian diatas yaitu penelitian tersebut membahas hak pilih Polri dalam pemilu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan penelitian saya membahas hak pilih orang dengan gangguan jiwa dalam pemilu menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2018.⁶⁷

Penelitian yang keempat yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan Wahyu Fadhil Ramadhan yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XIII/2015”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Medan, Sumatera Utara, 2018. Tujuan Dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum. Persamaan Penelitian di atas dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas mengenai hak pilih penyandang

⁶⁷ Skripsi, Puji Rahayu, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Hak Pilih Anggota Polri Dalam Pemilu*, Fakultas Syari’ah , Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Lampung, November 2018.

disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa terhadap dalam pemilihan umum . Perbedaaanya penelitian ini yaitu berfokus pada putusan MK Nomor: 135/Puu-Xiii/2015 sedangkan penelitian peneliti ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2018.⁶⁸



⁶⁸ Wahyu Fadhil Ramdhan, *Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XIII/2015)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Medan, Sumatera Utara, 2018.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN Tafsir

1. Al- Qur'an.
2. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Edisi 1 Cet, Jakarta: kencana, 2006.

B. AL-HADITS

1. Ibn Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah.
2. Al-Mawardi, *Al-ahkam As-Sulsthaniyyah*, Penerjemah Fadli Bahri, Jakarta: DarulFalah, 2006.
3. HR. Abu Daud Nomor 3882.
4. Ibnu Khaldun, *Muqadimmah*, Penerjemah Ahamdie Thoha Jakarta: Pustaka Firadaus, 2002.

C. FIQH & USHUL FIQH

1. Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
2. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
3. Ahmad Sadzali, *Pengangkatan Kepala Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2018.
4. Ahmad Sukaraja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
5. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
6. Amir Syafiruddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 2003.
7. Amir Syarifuffin, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
8. Eka N, A.M, Silombing Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan : Pustaka Prima, 2017.
9. Ibn Manzur, *Lisan al-'arab*, Beirut : Dar' al-shadir Jilid 4, 1968.

10. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2014.
11. Mugar Ibnu Syarif, *Hak Hak Poilitik Minoritas Nonmuslim dalam Komunitas Islam : Tinjauan dari perspektif Politik Islam*, Bandung: Penerbit Angkasa, 2003.
12. Munawir Sadjadali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1990.
13. Prof, H. A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemashalatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta : Kencana, 2004.
14. Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, Jakarta : Gozian Press, 2013.
15. Sutisna, *Pemilihan kepala negara menurut Perspektif Hukum Islam* Yogyakarta : Deepublish, 2014.

D. HUKUM-HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra AdityaBakti, 2004.
2. Eka N, A.M, Silombing Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan : Pustaka Prima, 2017.
3. Moh kusrardi, Harmaily ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara, cet.V*, Jakarta : Nadir, Ahmad, *PilkadaLangsungdanMasaDepanDemokrasi*, Malang: Averroes Press, 2006.
4. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 *Tentang kesehatan Jiwa*.
5. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, *Tentang Penyandang Disabilitas*.
6. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, *Tentang penyandang disabilitas*.
7. Pasal 198 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, *Tentang Pemilihan Umum*.
8. Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018, *Tentang penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.

9. Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018, *Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018*.
10. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, *Tentang Pemilihan Umum*.
11. Prof. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/-XIII/2015.
13. Ramlan surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
14. Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

E. BUKU PENUNJANG

1. AmiruddindanZainalAsikin, *PengantarMetodePenelitianHukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
3. Fajar Kurniawan, "Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia Di Instalasi Gangguan Jiwa RSUD Banyumas", Universitas Muhammadiyah Purwoekorto, 2016.
4. Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet.VII, Bandung : Mandar Maju, 1996.
5. Lukman Arake, 2015. "Sistem Pengangkatan Presiden dalam Fikih Siyasah", *Jurnal Ahkam* , Vol. XV, No 1.
6. Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet.VII, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
7. Miriam Budiarjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, 1990.
8. Mustafa Fahmi, *Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat Jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

9. *Panduan Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS Pemilu 2019*, Jakarta : Komisi Pemilihan Umum, 2019.
10. Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
11. Skripsi Ariza Rahmawati, *Kriteria Dalam Pemilihan Kepala Negara Menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Tinjau Dari Fiqh Siyasah*, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Lampung, November 2018.
12. Skripsi, Muhammad Renaldi, *Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/Puu-Xiii/2015 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqih Siyasah*, Institut Agama Islam Negeri , Palangka Raya, Oktober 2019.
13. Skripsi, Puji Rahayu, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Hak Pilih Anggota Polri Dalam Pemilu*, Fakultas Syari'ah , Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Lampung, November 2018.
14. Soerjono Soekarnodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo, 2013.
15. Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
16. Sutisna, *Pemilihan kepala negara menurut Perspektif Hukum Islam* Yogyakarta : Deepublish, 2014.
17. Yahya Ismail, *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah*, Penerjemah Andi Suherman, Gema Insani Press: Jakarta, 1995.